



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
UNIT KERJA : PIMPINAN TINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANWAR SADAT
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 207719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.470.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 845.000.000
2. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 399 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 346 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 11 m2/30 m2 di KAB / KOTA TANJUNG JABUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **310.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA XIH02N35MI/AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000



3. MOBIL, DAIHATSU AYLA D620-03216 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, HONDA HR-V HR-V RU11.5 E PLUS CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.006.749.894

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.967.649.894

III. HUTANG Rp. 100.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.867.649.894

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.